



BUKU I

RENCANA INDUK GERAKAN PKK

TAHUN 2025 - 2029

**HASIL RAPAT KERJA NASIONAL (RAKERNAS) X PKK
TAHUN 2025**

**DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA
KEMENTERIAN DALAM NEGERI &
TIM PENGGERAK PKK PUSAT**



KATA PENGANTAR

KETUA UMUM TIM PENGGERAK PKK

Dengan penuh syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, kita telah berhasil menyelenggarakan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) X PKK tahun 2025 yang dilaksanakan pada tanggal 8 Juli 2025 di Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur. Rakernas X ini menjadi momentum penting bagi kita untuk mengevaluasi capaian program, menyusun rencana kerja ke depan, serta mempererat sinergi antara pengurus, kader, dan seluruh elemen masyarakat.

Rakernas X PKK Tahun 2025 diselenggarakan dengan agenda untuk membahas dan menyepakati tiga materi utama, yaitu 1) Rencana Induk Gerakan PKK Tahun 2025 – 2029; 2) Strategi Gerakan PKK, dan 3) Petunjuk Teknis Tata Kelola Kelembagaan Gerakan PKK. Dokumen ini disusun dengan cermat melalui proses kajian mendalam, diskusi intensif, kolaborasi lintas pemangku kepentingan dengan tujuan menciptakan visi yang terintegrasi, berkelanjutan, dan berorientasi pada masa depan. Dokumen ini merupakan wujud komitmen PKK untuk melanjutkan perjalanan pembangunan nasional yang inklusif, berkelanjutan, dan berkeadilan, sejalan dengan visi Indonesia Emas 2045.

Penting untuk dicatat bahwa efisiensi anggaran tidak mengurangi kualitas pekerjaan, melainkan justru mendorong peningkatan efektivitas dan efisiensi dalam mencapai tujuan yang ditetapkan. Beberapa langkah yang dapat diambil untuk memastikan efisiensi anggaran tidak menyurutkan kerja seperti pemanfaatan teknologi. Pemanfaatan teknologi telah dilakukan oleh Tim Penyusun Dokumen Rapat Kerja Nasional yakni penggunaan layanan konferensi video untuk melakukan pertemuan virtual.

Atas nama pribadi dan organisasi, saya menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh tim penyusun, narasumber, mitra kerja, serta pengurus TP PKK di seluruh Indonesia yang telah berkontribusi aktif dalam penyusunan dokumen ini. Semoga dokumen hasil Rakernas X ini dapat menjadi rujukan strategis yang tidak hanya dibaca, tetapi juga diimplementasikan secara konsisten hingga ke tingkat desa dan kelurahan.

Mari kita terus perkuat sinergi, berinovasi tanpa henti, dan menjaga semangat kebersamaan demi mewujudkan keluarga yang sejahtera sebagai fondasi Indonesia yang lebih maju.

KETUA UMUM,

NY. TRI TITO KARNAVIAN

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 400.7-3465 TAHUN 2025 TENTANG PENGESAHAN KEPUTUSAN KETUA UMUM TP PKK TENTANG HASIL RAPAT KERJA NASIONAL X PKK TAHUN 2025	v
KEPUTUSAN KETUA UMUM TP PKK NOMOR 012/KEP/PKK.PST/VIII/2025 TENTANG PENETAPAN HASIL RAPAT KERJA NASIONAL X PKK TAHUN 2025	viii
RUMUSAN HASIL RAKERNAS X PKK	xi
BAB I PENDAHULUAN	3
A. Latar Belakang	4
B. Dasar Hukum	5
C. Maksud dan Tujuan	6
BAB II VISI, MISI, ASAS, TUJUAN DAN SASARAN GERAKAN PKK	7
A. Visi.....	8
B. Misi.....	8
C. Asas-Asas	9
D. Tujuan.....	10
E. Sasaran.....	10
BAB III OPERASIONALISASI 10 PROGRAM POKOK PKK	12
A. Ruang Lingkup 10 Program Pokok PKK	13
B. Pemetaan 10 Program PKK dengan Arah Kebijakan Nasional..	15
C. Operasionalisasi 10 Program Pokok PKK.....	25
BAB IV PENUTUP	37
A. Kesimpulan.....	38
B. Rekomendasi.....	38



MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR 400.7 – 3465 TAHUN 2025

TENTANG

PENGESAHAN KEPUTUSAN KETUA UMUM TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN
KESEJAHTERAAN KELUARGA TENTANG
HASIL RAPAT KERJA NASIONAL X PKK TAHUN 2025

MENTERI DALAM NEGERI,

- Menimbang : a. bahwa Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga sebagai gerakan yang tumbuh dari, oleh, dan untuk masyarakat telah mampu meningkatkan kesejahteraan keluarga-keluarga di seluruh pelosok nusantara pada khususnya, maupun masyarakat Indonesia pada umumnya sebagaimana menjadi tujuan pembangunan nasional;
- b. bahwa pengelolaan Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga yang dibina oleh Tim Penggerak PKK secara berjenjang mulai dari pusat sampai dengan daerah senantiasa dievaluasi melalui mekanisme Rapat Kerja Nasional PKK sebagaimana telah dilaksanakannya Rapat Kerja Nasional X PKK Tahun 2025 yang menghasilkan keputusan-keputusan penting sebagai landasan operasional lima tahun berikutnya;
- c. bahwa keputusan-keputusan Hasil Rapat Kerja Nasional X PKK Tahun 2025, perlu disahkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri selaku Ketua Pembina Tim Penggerak PKK Pusat;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Pengesahan Keputusan Ketua Umum Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga tentang Hasil Rapat Kerja Nasional X PKK Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 12);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 226);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 580);

Memperhatikan : Keputusan Ketua Umum Tim Penggerak PKK Nomor 012/KEP/PKK.Pst/VIII/2025 tanggal 15 Agustus 2025 tentang Penetapan Hasil Rapat Kerja Nasional X PKK Tahun 2025;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PENGESAHAN KEPUTUSAN KETUA UMUM TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA TENTANG HASIL RAPAT KERJA NASIONAL X PKK TAHUN 2025

KESATU : Mengesahkan dan memberlakukan Keputusan Ketua Umum Tim Penggerak PKK tentang Hasil Rapat Kerja Nasional X PKK Tahun 2025 yang terdiri dari:

1. Rencana Induk Gerakan PKK Tahun 2025-2029;
2. Strategi Gerakan PKK; dan
3. Petunjuk Teknis Tata Kelola Kelembagaan Gerakan PKK.

KEDUA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Menteri ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/ Kota, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

KETIGA : Pada saat Keputusan Menteri ini berlaku, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 411.4 - 4946 Tahun 2021 tentang Pengesahan Keputusan Ketua Umum Tim Penggerak PKK tentang Hasil Rapat Kerja Nasional X PKK Tahun 2021 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 29 Agustus 2025
MENTERI DALAM NEGERI,

ttd

MUHAMMAD TITO KARNAVIAN

Tembusan Yth.:

1. Bapak Presiden Republik Indonesia;
2. Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia;
3. Ibu Pelindung Utama TP PKK;
4. Ibu Pelindung TP PKK;
5. Para Menteri Kabinet Merah Putih;
6. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri;
7. Ibu Ketua Umum TP PKK;
8. Gubernur di Seluruh Indonesia;
9. Bupati/Wali Kota di Seluruh Indonesia;
10. Ketua TP PKK Provinsi di Seluruh Indonesia; dan
11. Ketua TP PKK Kabupaten/Kota di Seluruh Indonesia.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum



Dr. Astawa, AP., M.Si
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP 197410151993111003



**PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA
PKK
TIM PENGGERAK PUSAT**

KEPUTUSAN KETUA UMUM TIM PENGGERAK PKK

Nomor : 012/KEP/PKK.Pst/VIII/2025

T E N T A N G

PENETAPAN HASIL RAPAT KERJA NASIONAL X PKK TAHUN 2025

KETUA UMUM TIM PENGGERAK

PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA,

- Menimbang** :
- a. bahwa hakikat pembangunan nasional merupakan pembangunan manusia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya, yang dapat terwujud jika kesejahteraan keluarga dan masyarakat dapat dicapai dengan baik;
 - b. bahwa pemberdayaan keluarga yang tumbuh dari, oleh, dan untuk masyarakat menjadi salah satu tolok ukur dalam pembangunan yang perlu mendapatkan prioritas penanganan secara terencana, terpadu, terstruktur, merata, dan berkualitas yang bersendikan kearifan lokal melalui gerakan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga;
 - c. bahwa pengelolaan gerakan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga selama ini dilakukan oleh Tim Penggerak PKK secara berjenjang, mulai Tim Penggerak PKK Pusat, Tim Penggerak PKK Provinsi, Tim Penggerak PKK Kabupaten/Kota, sampai dengan Tim Penggerak PKK Kecamatan dan Tim Penggerak PKK Desa/Kelurahan, dengan menerapkan 10 Program Pokok PKK;
 - d. bahwa penerapan 10 Program Pokok PKK beserta tata kelola kelembagaan gerakan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga senantiasa dipantau dan dievaluasi secara komprehensif melalui Rapat Kerja Nasional PKK yang diselenggarakan setiap lima tahun sekali;
 - e. bahwa sesuai dengan masa periodisasi kegiatan lima tahunan, telah diselenggarakan Rapat Kerja Nasional PKK X Tahun 2025 yang dilaksanakan secara tidak langsung dalam jaringan dan secara langsung luar jaringan di Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur pada tanggal 8 Juli 2025;

- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e perlu menetapkan Keputusan Ketua Umum Tim Penggerak PKK tentang Penetapan Hasil Rapat Kerja Nasional PKK X Tahun 2025.

Mengingat : 1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 226);
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 580).

Memperhatikan : 1. Pengarahan Menteri Dalam Negeri selaku Ketua Pembina Tim Penggerak PKK Pusat pada saat pembukaan Rapat Kerja Nasional X PKK Tahun 2025;
2. Sambutan Ketua Umum Tim Penggerak PKK pada saat Sidang Pleno Rapat Kerja Nasional X PKK Tahun 2025;
3. Paparan Materi Inti Rapat Kerja Nasional X PKK Tahun 2025 yang terdiri dari Draft Rencana Induk Gerakan PKK Tahun 2024 – 2029, Strategi Gerakan PKK dan Petunjuk Teknis Tata Kelola Kelembagaan Gerakan PKK;
4. Hasil Pendalaman Materi dari Tim Penyusun Bidang Rencana Induk dan Strategi Gerakan PKK, Tim Penyusun Bidang Kelembagaan PKK, dan Tim Penyusun Bidang Administrasi dan Data PKK;
5. Saran masukan dan pendapat dari Tim Penggerak PKK seluruh Indonesia;
6. Rekomendasi Tim Perumus Rapat Kerja Nasional X PKK Tahun 2025.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Hasil Rapat Kerja Nasional X PKK Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Hasil Rapat Kerja Nasional X PKK Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU terdiri dari Rekomendasi Tim Perumus Rapat Kerja Nasional X PKK Tahun 2025, Materi Rumusan Rencana Induk Gerakan PKK Tahun 2025 – 2029, Strategi Gerakan PKK dan Petunjuk Teknis Tata Kelola Kelembagaan Gerakan PKK yang merupakan satu

kesatuan dokumen Hasil Rapat Kerja Nasional X PKK Tahun 2025.

- KETIGA : Hasil Rapat Kerja Nasional X PKK Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU digunakan sebagai pedoman operasional dan mulai berlaku setelah mendapatkan pengesahan dari Menteri Dalam Negeri selaku Ketua Pembina Tim Penggerak PKK Pusat.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 15 Agustus 2025



KETUA UMUM,

NY. TRI TITO KARNAVIAN

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Dalam Negeri, selaku Ketua Pembina TP PKK Pusat;
2. Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa, Kementerian Dalam Negeri;
3. Pengurus Pusat Tim Penggerak PKK;
4. Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi, seluruh Indonesia;
5. Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten/Kota, seluruh Indonesia.



RUMUSAN HASIL RAKERNAS X PKK TAHUN 2025

Dengan mempertimbangkan hasil pembahasan pada rangkaian kegiatan Rapat Kerja Nasional X PKK, dan telaah terhadap kebutuhan aktual, serta dinamika pada pelaksanaan Gerakan PKK dan merujuk pada arah kebijakan pembangunan nasional, maka Tim Perumus Hasil Rakernas X PKK yang terdiri dari Tim Penggerak PKK Pusat dan perwakilan Tim Penggerak PKK Provinsi menyampaikan pandangan akhir sebagai Rumusan Hasil Rakernas X PKK, sebagai berikut:

1. Gerakan PKK Tahun 2025-2029 berkomitmen mendukung Visi Misi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia serta arah kebijakan pembangunan nasional. Komitmen ini sejalan dengan Visi Gerakan PKK Tahun 2025-2029, yaitu: *"Terwujudnya Keluarga Berdaya dan Sejahtera untuk Mendukung Asta Cita Menuju Indonesia Emas 2045"*. Visi tersebut akan diwujudkan melalui 5 (lima) Misi strategis yang diturunkan ke dalam berbagai program unggulan dan program prioritas.
2. Menyepakati Rencana Induk Gerakan PKK Tahun 2025-2029 dan Strategi Gerakan PKK Hasil Rakernas X PKK Tahun 2025 sebagai acuan utama dalam perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan di semua jenjang kelembagaan Gerakan PKK.
3. Menyepakati Petunjuk Teknis Tata Kelola Kelembagaan Gerakan PKK sebagai pedoman dalam menjalankan tugas, fungsi dan tata kelola organisasi secara berjenjang dan terpadu.
4. Mengusulkan ketiga dokumen yakni - *Rencana Induk Gerakan PKK Tahun 2025-2029, Strategi Gerakan PKK, dan Petunjuk Teknis Tata Kelola Kelembagaan Gerakan PKK* - untuk disahkan sebagai Hasil Rakernas X PKK oleh Ketua Umum Tim Penggerak PKK, serta ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri selaku Ketua Pembina Tim Penggerak PKK Pusat. Selanjutnya, dokumen-dokumen tersebut akan menjadi rujukan resmi dalam pelaksanaan Gerakan PKK di seluruh jenjang.
5. Mengusulkan revisi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan PKK, dengan penyesuaian sebagai berikut:

- a. Merubah masa jabatan Ketua TP PKK Desa dari semula 6 tahun menjadi 8 tahun sesuai Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
 - b. Menambahkan ‘Wakil Ketua’ pada struktur Tim Penggerak PKK Provinsi dan Kabupaten/Kota;
 - c. Menambahkan “Sekretaris III” pada struktur Tim Penggerak PKK Provinsi dan “Sekretaris II” pada struktur Tim Penggerak PKK Kabupaten/Kota;
 - d. Pengintegrasian Kelompok Dasawisma ke dalam struktur Kelompok PKK, selain Kelompok PKK Dusun/Lingkungan, RW dan RT; dan
 - e. Penyesuaian lainnya sebagaimana tertuang dalam Petunjuk Teknis Tata Kelola Kelembagaan Gerakan PKK.
6. Mendorong seluruh Tim Penggerak PKK di semua jenjang pusat dan daerah untuk:
- a. Menyusun Strategi Gerakan PKK setiap tahunnya, sebagai langkah operasional dalam mencapai Visi dan Misi Gerakan PKK 2025–2029;
 - b. Mengintegrasikan program-program PKK ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah dan desa;
 - c. Melakukan sinergi dan kolaborasi multipihak dengan pemangku kepentingan, seperti kementerian/lembaga, perangkat daerah, sektor swasta, lembaga donor, institusi pendidikan, media, lembaga kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat dan pihak lainnya dalam mendukung pelaksanaan program; dan
 - d. Melakukan penataan, pembinaan dan pendayagunaan Kelompok PKK di tingkat Dusun/Lingkungan, RW dan RT melalui penetapan kepengurusan oleh Kepala Desa/Lurah, pemberian asistensi dan supervisi, serta penguatan kapasitas melalui pelatihan yang berkelanjutan dan berbasis potensi lokal.

Ditetapkan di
Kota Samarinda, 8 Juli 2025

Ketua Tim Perumus Hasil Rakernas X PKK
Tahun 2025

Ttd.

Ny. Yane Ardian Bima Arya



BAB I PENDAHULUAN



BAB I PENDAHULUAN

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) merupakan gerakan nasional yang tumbuh dari, oleh, dan untuk masyarakat sebagai wahana pemberdayaan keluarga dalam rangka mewujudkan keluarga yang berdaya dan sejahtera. Sebagai mitra strategis pemerintah, Gerakan PKK selama lebih dari lima dekade telah memainkan peran penting dalam penguatan ketahanan keluarga, peningkatan partisipasi masyarakat, serta akselerasi pencapaian tujuan pembangunan nasional.

Dalam era transformasi sosial, ekonomi, dan teknologi yang berlangsung cepat, keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat dihadapkan pada berbagai tantangan baru, termasuk meningkatnya kesenjangan sosial, dinamika pola pengasuhan, kerentanan terhadap krisis kesehatan, dan tekanan ekonomi rumah tangga. Di sisi lain, perkembangan teknologi digital dan meningkatnya literasi digital masyarakat, serta peluang kolaborasi lintas sektor juga membuka ruang-ruang baru bagi keluarga untuk tumbuh menjadi subjek pembangunan yang aktif, mandiri, inklusif dan berdaya saing.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025 –2029 sebagai fase awal dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025–2045 menuju Visi Indonesia Emas 2045, menekankan pentingnya pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing, transformasi sosial berbasis nilai gotong royong, serta penguatan tata kelola pemerintahan yang inklusif dan partisipatif. Dalam konteks ini, peran keluarga sebagai pusat pembentukan nilai, karakter, dan ketahanan sosial menjadi semakin strategis.

Sebagai upaya merespons arah pembangunan nasional tersebut, Gerakan PKK menegaskan kembali komitmennya untuk memperkuat peran keluarga Indonesia sebagai agen perubahan sosial. Melalui Rencana Induk Gerakan PKK Tahun 2025–2029, diharapkan terbangun kerangka strategis yang terintegrasi, adaptif, dan berorientasi hasil, sebagai panduan bersama bagi seluruh jajaran Tim Penggerak PKK di semua jenjang dalam

mengimplementasikan 10 Program Pokok PKK secara efektif dan relevan.

Prioritas Rencana Induk Gerakan PKK Tahun 2025-2029 disusun dengan memadupadankan Visi Misi Presiden dan kebijakan RPJMN tahun 2025-2029. Program prioritas Gerakan PKK diarahkan secara konkret untuk mencapai sasaran pembangunan. Untuk memastikan keberhasilan pelaksanaan Rencana Induk Gerakan PKK Tahun 2025-2029, langkah penguatan juga dilakukan pada Strategi Gerakan PKK, terutama pada aspek gerakan secara terpadu. Strategi Gerakan PKK memastikan pelaksanaan Rencana Induk Gerakan PKK Tahun 2025-2029 berjalan sesuai rencana dan memformulasikan penyesuaian gerakan yang diperlukan.

Rencana Induk ini juga menjadi wujud aktualisasi visi Gerakan PKK Tahun 2025-2029, yaitu: *"Terwujudnya Keluarga Berdaya dan Sejahtera untuk Mendukung Asta Cita Menuju Indonesia Emas 2045"*. Visi tersebut mencerminkan semangat kolaborasi dan kontribusi nyata PKK dalam mendukung pembangunan nasional yang berkelanjutan dan inklusif, dengan keluarga sebagai poros utama penggerak perubahan.

B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
3. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025 – 2045
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa
5. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga
6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 - 2029

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri

C. Maksud dan Tujuan

Rencana Induk Gerakan PKK Tahun 2025 – 2029 disusun dengan maksud dan tujuan sebagai berikut:

1. Menyediakan arah kebijakan dan perencanaan nasional Gerakan PKK secara menyeluruh, sistematis, adaptif dan berorientasi hasil untuk periode 5 (lima) tahun mendatang.
2. Menjadi pedoman operasional dan rujukan bersama bagi seluruh jajaran Tim Penggerak PKK di tingkat pusat hingga desa/kelurahan dalam merancang dan melaksanakan program kerja yang sinergis, terukur, dan kontributif terhadap pembangunan nasional dan daerah.
3. Mendorong konsolidasi kelembagaan PKK sebagai mitra strategis pemerintah dalam pemberdayaan keluarga, serta meningkatkan efektivitas pelaksanaan 10 Program Pokok PKK secara berkelanjutan.
4. Menumbuhkan inovasi, partisipasi, dan jejaring kemitraan lintas sektor dalam mendukung tercapainya keluarga Indonesia yang berdaya, sejahtera, dan adaptif terhadap berbagai dinamika perubahan.
5. Menegaskan posisi strategis Gerakan PKK dalam kontribusinya terhadap pencapaian RPJMN 2025-2029 dan Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia dalam menuju Indonesia Emas 2045.



BAB II
VISI, MISI, ASAS, TUJUAN,
DAN SASARAN



BAB II

VISI, MISI, ASAS, TUJUAN, DAN SASARAN

A. Visi

Visi Gerakan PKK Tahun 2025-2029 dirumuskan untuk mencerminkan arah, semangat, dan komitmen jangka menengah Gerakan PKK dalam mendukung pembangunan nasional, serta visi pembangunan jangka panjang menuju Indonesia Emas 2045. Rumusan visi tersebut adalah:

"Terwujudnya Keluarga Berdaya dan Sejahtera untuk Mendukung Asta Cita Menuju Indonesia Emas 2045."

Visi ini menegaskan pentingnya peran strategis keluarga sebagai aktor utama dalam menciptakan masyarakat yang adil, sejahtera, tangguh dan berkarakter, dengan menempatkan keluarga sebagai pusat pembangunan manusia. Keluarga yang berdaya adalah keluarga yang memiliki kemampuan untuk mengenali, mengelola, dan mengembangkan potensi sumber dayanya secara mandiri dan produktif. Keluarga yang sejahtera tidak hanya merujuk pada aspek ekonomi, tetapi juga mencakup dimensi kesehatan, pendidikan, ketahanan moral, sosial dan lingkungan hidup yang layak.

Dengan menjadikan keluarga sebagai agen perubahan, Gerakan PKK berkontribusi aktif dalam pencapaian Asta Cita, yakni delapan cita-cita pembangunan nasional, khususnya dalam hal pembangunan manusia Indonesia unggul, mewujudkan masyarakat yang inklusif dan berdaya saing, serta berbasis nilai-nilai gotong royong, budaya dan kearifan lokal.

B. Misi

Untuk mewujudkan visi tersebut, Gerakan PKK menetapkan sejumlah misi yang menjadi landasan gerak dan strategi implementatif. Misi-misi tersebut adalah:

1. Memperkokoh nilai Pancasila, gotong royong dan demokrasi dalam kehidupan keluarga serta meningkatkan kesadaran akan hak asasi manusia.
2. Meningkatkan kualitas pendidikan dan keterampilan serta penguatan ekonomi keluarga.
3. Memantapkan ketahanan dan kemandirian keluarga melalui penguatan pangan lokal, pelestarian sandang berbasis budaya lokal yang beretika, serta peningkatan kualitas hunian dan tata laksana rumah tangga yang sehat, tertib, dan berkelanjutan.

4. Menggerakkan keluarga dalam perilaku hidup bersih dan sehat, melestarikan lingkungan hidup dan meningkatkan pembinaan keluarga berencana menuju keluarga berkualitas.
5. Memperkuat kelembagaan PKK yang lebih sistematis dan terencana, serta mendorong pemanfaatan teknologi informasi.

Misi-misi tersebut menjadi pijakan dalam merumuskan kebijakan, strategi, dan program kerja di seluruh jenjang pelaksanaan Gerakan PKK, baik pada level nasional, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, maupun desa/kelurahan.

C. Asas-Asas

Gerakan PKK berlandaskan pada sejumlah asas yang menjadi fondasi nilai, etika, dan prinsip dalam seluruh aktivitasnya. Asas-asas tersebut meliputi:

1. Gotong Royong, yaitu semangat kebersamaan, kekeluargaan dan kepedulian sosial yang menjadi ciri khas bangsa Indonesia;
2. Responsif, yaitu kemampuan cepat tanggap, adaptif dan proaktif dalam menjawab kebutuhan masyarakat;
3. Transparansi, yaitu upaya keterbukaan dalam setiap proses pelaksanaan kegiatan;
4. Informatif, yaitu pemanfaatan teknologi informasi yang mudah diakses oleh semua pihak;
5. Partisipatif dan Inklusif, yaitu menyediakan ruang keterlibatan aktif seluruh lapisan masyarakat, tanpa membedakan suku, agama, gender, usia, atau status sosial;
6. Akuntabilitas, yaitu upaya mencapai sasaran yang dapat dipertanggungjawabkan untuk menghindari potensi penyalahgunaan dan penyimpangan;
7. Kearifan Lokal, yaitu upaya menjunjung tinggi dan menerapkan budaya dan potensi lokal setempat;
8. Kemitraan, yaitu keterbukaan terhadap kerja sama dan sinergi dengan berbagai pihak, baik pemerintah, swasta, organisasi non-pemerintah, maupun masyarakat;
9. Kemandirian, yaitu menekankan kemampuan individu, keluarga atau kelompok untuk berpikir dan bersikap secara mandiri tanpa ketergantungan pada pihak lain, dengan mengandalkan potensi dan sumber daya sendiri;
10. Kemanusiaan, yaitu menekankan bahwa setiap aktivitas yang dilakukan mencerminkan perlindungan dan penghormatan pada hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional;

11. Keberlanjutan, yaitu menekankan bahwa setiap program dan kegiatan harus dirancang dan dilaksanakan dengan mempertimbangkan manfaat jangka panjang, tanpa memberikan dampak negatif pada lingkungan, sosial dan ekonomi;
12. Nasionalisme, yaitu upaya menanamkan rasa cinta tanah air, kebanggaan menjadi bangsa Indonesia, serta komitmen untuk menjaga persatuan, kesatuan dan kepentingan nasional di atas kepentingan pribadi dan golongan; dan
13. Non-partisan, yaitu menempatkan PKK sebagai gerakan dan/atau organisasi yang independen dari kepentingan politik praktis.

D. Tujuan

Gerakan PKK bertujuan untuk mewujudkan keluarga Indonesia yang berkualitas, sehat, mandiri, produktif, dan berdaya saing. Secara lebih rinci, tujuan Gerakan PKK adalah:

1. Tertanamnya nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan keluarga dan masyarakat.
2. Menguatnya budaya gotong royong dalam kehidupan masyarakat.
3. Tercapainya ketahanan pangan keluarga.
4. Meningkatnya kebanggaan dan penggunaan sandang yang bermoral dan beretika dan berbasis budaya lokal.
5. Terciptanya lingkungan rumah yang sehat, aman, dan tertata.
6. Meningkatnya kualitas pendidikan dan keterampilan keluarga, serta pemanfaatan teknologi informasi.
7. Meningkatnya derajat kesehatan keluarga.
8. Berkembangnya kehidupan berkoperasi dan kewirausahaan keluarga.
9. Terpeliharanya kelestarian lingkungan hidup oleh keluarga.
10. Terwujudnya perencanaan kehidupan berkeluarga yang sehat dan bertanggung jawab.
11. Terwujudnya Kelembagaan PKK yang efektif, efisien, adaptif, berdaya dan kolaboratif.

E. Sasaran

Sasaran strategis Gerakan PKK Tahun 2025–2029 diarahkan untuk mendukung sasaran utama pembangunan nasional dan pencapaian visi, misi serta tujuan Gerakan PKK Tahun 2025-2029. Sasaran tersebut dijabarkan sebagai berikut:

1. Meningkatnya partisipasi keluarga yang mengikuti kegiatan pembinaan nilai kebangsaan, bela negara, kesadaran hukum, dan penguatan karakter keluarga.

2. Meningkatnya partisipasi aktif keluarga dalam kegiatan sosial berbasis gotong royong, pemberdayaan kelompok rentan, dan kegiatan bakti sosial.
3. Meningkatnya pemanfaatan pekarangan untuk ketahanan pangan rumah tangga, konsumsi pangan beragam, bergizi, seimbang dan aman (B2SA), pengolahan hasil pangan, dan pencegahan susut serta sisa pangan.
4. Meningkatnya partisipasi keluarga dalam produksi dan pemanfaatan sandang lokal yang bermoral dan beretika, serta penguatan etika berpakaian yang berakar pada budaya bangsa.
5. Meningkatnya jumlah rumah tangga dengan kondisi fisik rumah yang sehat, aman, dan tertata, serta terselenggaranya edukasi dan pendampingan tata laksana rumah tangga di tingkat keluarga.
6. Meningkatnya cakupan keluarga penerima manfaat program pendidikan nonformal, serta pelatihan keterampilan berbasis potensi lokal dan digital.
7. Meningkatnya cakupan keluarga dalam percepatan penurunan stunting, praktik perilaku hidup bersih dan sehat, serta peduli kesehatan keluarga (Ayah, Ibu dan Anak).
8. Meningkatnya jumlah kelompok usaha ekonomi keluarga (UP2K PKK) dan koperasi yang aktif, produktif, serta didampingi secara berkelanjutan oleh kader PKK dan mitra terkait.
9. Meningkatnya partisipasi keluarga yang terlibat dalam kegiatan pelestarian lingkungan, melalui pengelolaan sampah rumah tangga, mengurangi pencemaran serta meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab terhadap lingkungan hidup, serta mitigasi bencana berbasis keluarga.
10. Meningkatnya partisipasi keluarga yang menjalankan program keluarga sehat berkualitas, memiliki perencanaan keuangan sehat, serta memperoleh edukasi kesehatan reproduksi secara tepat dan berkelanjutan.
11. Meningkatnya kapasitas kelembagaan PKK yang efektif, efisien, adaptif, berdaya dan kolaboratif.



BAB III
OPERASIONALISASI 10
PROGRAM POKOK PKK



BAB III

OPERSIONALISASI 10 PROGRAM POKOK PKK

A. Ruang Lingkup 10 Program Pokok PKK

10 Program Pokok PKK merupakan kerangka kerja tematik yang menyatu dan saling melengkapi dalam upaya pemberdayaan keluarga dan pembangunan masyarakat. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan PKK, telah disebutkan ruang lingkup pelaksanaan dari masing-masing 10 Program Pokok PKK, untuk kemudian dapat disesuaikan pelaksanaannya sesuai dengan arah kebijakan nasional, prioritas pembangunan daerah, serta kebutuhan dan potensi lokal.

Berikut adalah ruang lingkup pelaksanaan 10 Program Pokok PKK:

1. Penghayatan dan Pengamalan Pancasila, dilaksanakan paling sedikit dengan cara:
 - a. Pembinaan karakter keluarga melalui pola asuh anak dan remaja dengan penuh cinta dan kasih sayang dalam keluarga
 - b. Pembinaan keluarga sadar hukum
 - c. Pembinaan kesadaran bela negara
 - d. Pembinaan pencegahan penyalahgunaan narkoba
 - e. Pembinaan pencegahan kekerasan dalam rumah tangga
 - f. Pembinaan pencegahan perdagangan manusia
 - g. Pembinaan pencegahan kekerasan seksual terhadap anak
2. Gotong Royong, dilaksanakan paling sedikit dengan cara:
 - a. Menumbuhkan sikap kesetiakawanan sosial
 - b. Memberdayakan kelompok lanjut usia
 - c. Partisipasi dalam kegiatan bakti sosial di masyarakat
 - d. Berpartisipasi dalam program pembangunan

3. Pangan, dilaksanakan paling sedikit dengan cara:
 - a. Menggerakkan keluarga dalam pemenuhan kebutuhan pangan melalui halaman asri teratur indah dan nyaman
 - b. Menggerakkan keluarga dalam percepatan keanekaragaman konsumsi pangan
 - c. Menggerakkan keluarga mengkonsumsi makanan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman
 - d. Mendukung dan berperan serta dalam kegiatan penyediaan makanan tambahan
4. Sandang, dilaksanakan paling sedikit dengan cara:
 - a. Membudayakan perilaku berbusana sesuai moral budaya Indonesia
 - b. Memasyarakatkan pakaian adat pada acara tertentu
 - c. Pengembangan pola pendampingan kepada usaha sandang kecil mikro
5. Perumahan dan Tata Laksana Rumah Tangga, dilaksanakan paling sedikit dengan cara:
 - a. Memasyarakatkan pemanfaatan sumber daya energi dan teknologi tepat guna
 - b. Pembinaan rumah sehat layak huni
 - c. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan tentang tata laksana rumah tangga dalam harmonisasi kehidupan keluarga
6. Pendidikan dan Keterampilan, dilaksanakan paling sedikit dengan cara:
 - a. Pembinaan keluarga tentang wajib belajar dua belas tahun
 - b. Menggerakkan keluarga dalam peningkatan keterampilan dan pendidikan
 - c. Memfasilitasi peningkatan kapasitas tutor kelompok belajar paket A, paket B, dan paket C melalui kerjasama dengan instansi terkait
 - d. Meningkatkan kapasitas pelatih dan kader PKK dengan menggunakan modul pelatihan PKK
7. Kesehatan, dilaksanakan paling sedikit dengan cara:
 - a. Menggerakkan keluarga dalam perilaku hidup bersih dan sehat
 - b. Pembinaan peran serta masyarakat dalam upaya penurunan angka kematian ibu, bayi dan balita

- c. Pembinaan keluarga yang sadar gizi
 - d. Mendukung program pencegahan dan deteksi dini kanker pada perempuan
 - e. Pembinaan keluarga dalam pelaksanaan imunisasi dan pencegahan penyakit menular maupun tidak menular serta asuhan mandiri dalam keluarga
8. Pengembangan Kehidupan Berkoperasi, dilaksanakan paling sedikit dengan cara:
- a. Menggerakkan keluarga dalam peningkatan kualitas pengelolaan ekonomi keluarga melalui usaha peningkatan pendapatan keluarga
 - b. Pembinaan keluarga dalam pelaksanaan dan pengembangan kelompok usaha peningkatan pendapatan keluarga (UP2K) PKK
 - c. Mendorong pembentukan koperasi oleh kelompok khusus usaha peningkatan pendapatan keluarga (UP2K) PKK
 - d. Mengembangkan kreatifitas melalui usaha mikro kecil dan menengah berbasis teknologi informasi
9. Kelestarian Lingkungan Hidup, dilaksanakan paling sedikit dengan cara:
- a. Pembinaan keluarga dalam memelihara dan menjaga lingkungan bersih dan sehat
 - b. Melestarikan lingkungan hidup
10. Perencanaan Sehat, dilaksanakan paling sedikit dengan cara:
- a. Pembinaan keluarga dalam meningkatkan keluarga berencana menuju keluarga berkualitas
 - b. Melakukan perencanaan keuangan yang baik untuk kehidupan keluarga sehat

B. Pemetaan 10 Program PKK dengan Arah Kebijakan Nasional

Sebagai mitra strategis pemerintah dalam pembangunan berbasis keluarga, Gerakan PKK memerlukan keselarasan dengan arah pembangunan nasional sebagaimana termuat dalam RPJMN 2025–2029. Oleh karena itu, pemetaan 10 Program Pokok PKK terhadap Arah Kebijakan Nasional menjadi elemen penting dalam Rencana Induk ini.

Pemetaan ini bertujuan untuk merumuskan kategori prioritas pelaksanaan program dan memastikan setiap program yang akan dilaksanakan dapat sejalan dengan 17 Program Prioritas Presiden, berkontribusi terhadap Sasaran Pembangunan Nasional, serta dapat memperkuat pencapaian 8 Misi Pembangunan - Asta Cita sebagai bagian dari visi menuju Indonesia Emas 2045. Untuk selanjutnya, pemetaan ini dapat menjadi acuan dalam operasionalisasi 10 Program Pokok PKK secara umum dan dalam Strategi Gerakan PKK secara teknis di setiap jenjang, dengan menyesuaikan visi misi Kepala Daerah/Desa, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah/Desa (RPJMD/RPJMDes), serta potensi dan kebutuhan masyarakat setempat.

Tabel berikut menyajikan keterkaitan strategis antara 10 Program Pokok PKK dengan tujuan dan sasaran Gerakan PKK Tahun 2025-2029, rumusan kategori prioritas, serta arah kebijakan nasional terkait.

Tabel 3.1. Pemetaan 10 Program Pokok PKK pada Arah Kebijakan Nasional

NO	PROGRAM POKOK PKK	TUJUAN	SASARAN	KATEGORI PRIORITAS	KEBIJAKAN NASIONAL YANG DIDUKUNG
1	Penghayatan dan Pengamalan Pancasila	Tertanamnya nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan keluarga dan masyarakat.	Meningkatnya partisipasi keluarga yang mengikuti kegiatan pembinaan nilai kebangsaan, bela negara, kesadaran hukum, dan penguatan karakter keluarga.	Pembinaan karakter keluarga	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Asta Cita 1 Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan HAM. ▪ Asta Cita 4 Memperkuat pembangunan SDM, sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.

NO	PROGRAM POKOK PKK	TUJUAN	SASARAN	KATEGORI PRIORITAS	KEBIJAKAN NASIONAL YANG DIDUKUNG
					<ul style="list-style-type: none"> ▪ Asta Cita 7 Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan. ▪ Program Prioritas 6 Pencegahan dan Pemberantasan Narkoba.
2	Gotong Royong	Menguatnya budaya gotong royong dalam kehidupan masyarakat.	Meningkatnya partisipasi aktif keluarga dalam kegiatan sosial berbasis gotong royong, pemberdayaan kelompok rentan, dan kegiatan bakti sosial.	<ul style="list-style-type: none"> a. Penguatan ketahanan sosial b. Pemberdayaan kelompok lanjut usia 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Asta Cita 4 Memperkuat pembangunan SDM, sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas. ▪ Asta Cita 8 Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta

NO	PROGRAM POKOK PKK	TUJUAN	SASARAN	KATEGORI PRIORITAS	KEBIJAKAN NASIONAL YANG DIDUKUNG
					<p>peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Program Prioritas 10 Penguatan kesetaraan gender dan perlindungan hak perempuan, anak, serta penyandang disabilitas.
3	Pangan	Tercapainya ketahanan pangan keluarga.	Meningkatnya pemanfaatan pekarangan untuk ketahanan pangan rumah tangga, konsumsi pangan beragam, bergizi, seimbang dan aman (B2SA), pengolahan hasil pangan, dan pencegahan susut serta sisa pangan.	Penguatan ketahanan pangan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Asta Cita 2 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau dan ekonomi biru. ▪ Program Prioritas 1 Swasembada pangan, energi, air ▪ Program Hasil Terbaik Cepat

NO	PROGRAM POKOK PKK	TUJUAN	SASARAN	KATEGORI PRIORITAS	KEBIJAKAN NASIONAL YANG DIDUKUNG
					Mencetak dan meningkatkan produktivitas lahan pertanian dengan lumbung pangan desa, daerah dan nasional.
4	Sandang	Meningkatnya kebanggaan dan penggunaan sandang yang bermoral dan beretika serta berbasis budaya lokal.	Meningkatnya partisipasi keluarga dalam produksi dan pemanfaatan sandang lokal yang bermoral dan beretika, serta penguatan etika berpakaian yang berakar pada budaya bangsa.	Penguatan sandang lokal dan etika berpakaian	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Asta Cita 8 Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. ▪ Program Prioritas 17 Pelestarian seni budaya, peningkatan ekonomi

NO	PROGRAM POKOK PKK	TUJUAN	SASARAN	KATEGORI PRIORITAS	KEBIJAKAN NASIONAL YANG DIDUKUNG
					kreatif, dan peningkatan prestasi olahraga.
5	Perumahan & Tata Laksana Rumah Tangga	Terciptanya lingkungan rumah yang sehat, aman, dan tertata.	Meningkatnya jumlah rumah tangga dengan kondisi fisik rumah yang sehat, aman, dan tertata, serta terselenggaranya edukasi dan pendampingan tata laksana rumah tangga di tingkat keluarga.	Penguatan rumah sehat layak huni	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Program Prioritas 13 Menjamin pembangunan hunian berkualitas, terjangkau, bersanitasi baik untuk masyarakat perdesaan/perkotaan dan rakyat yang membutuhkan.
6	Pendidikan dan Keterampilan	Meningkatnya kualitas pendidikan dan keterampilan keluarga, serta pemanfaatan	Meningkatnya cakupan keluarga penerima manfaat program pendidikan nonformal, serta pelatihan	<ul style="list-style-type: none"> a. Perluasan layanan Pendidikan Anak Usia Dini b. Pencegahan dan penanganan anak tidak sekolah c. Penguatan keterampilan 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Asta Cita 3 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas,

NO	PROGRAM POKOK PKK	TUJUAN	SASARAN	KATEGORI PRIORITAS	KEBIJAKAN NASIONAL YANG DIDUKUNG
		teknologi informasi.	keterampilan berbasis potensi lokal dan digital.		<p>mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Asta Cita 4 Memperkuat pembangunan SDM, sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas. ▪ Program Prioritas 8 Penguatan pendidikan, sains, dan teknologi, serta digitalisasi.

NO	PROGRAM POKOK PKK	TUJUAN	SASARAN	KATEGORI PRIORITAS	KEBIJAKAN NASIONAL YANG DIDUKUNG
7	Kesehatan	Meningkatnya derajat kesehatan keluarga.	Meningkatnya cakupan keluarga dalam percepatan penurunan stunting, praktik perilaku hidup bersih dan sehat, serta peduli kesehatan keluarga (Ayah, Ibu dan Anak).	<ul style="list-style-type: none"> a. Penggerakan keluarga dalam perilaku hidup bersih dan sehat b. Pembinaan dalam penurunan angka kematian ibu, bayi dan balita c. Pembinaan keluarga sadar gizi d. Pencegahan dan deteksi dini kanker pada perempuan e. Pembinaan keluarga dalam pelaksanaan imunisasi f. Pencegahan penyakit menular maupun tidak menular 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Asta Cita 4 Memperkuat pembangunan SDM, sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas. ▪ Program Prioritas 7 Menjamin tersedianya pelayanan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia. ▪ Program Hasil Terbaik Cepat Pemeriksaan kesehatan gratis, menuntaskan kasus TBC.
8	Pengembangan Kehidupan Berkoperasi	Berkembangnya kehidupan berkoperasi dan kewirausahaan keluarga.	Meningkatnya jumlah kelompok usaha ekonomi keluarga (UP2K PKK) dan koperasi yang aktif, produktif, serta didampingi secara	Peningkatan produktivitas usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Asta Cita 3 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong

NO	PROGRAM POKOK PKK	TUJUAN	SASARAN	KATEGORI PRIORITAS	KEBIJAKAN NASIONAL YANG DIDUKUNG
			berkelanjutan oleh kader PKK dan mitra terkait.		<p>kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Program Prioritas 14 Melanjutkan pemerataan ekonomi dan penguatan UMKM melalui program kredit usaha.
9	Kelestarian Lingkungan Hidup	Terpeliharanya kelestarian lingkungan hidup oleh keluarga.	Meningkatnya partisipasi keluarga yang terlibat dalam kegiatan pelestarian lingkungan, melalui pengelolaan sampah rumah tangga, mengurangi pencemaran serta meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab terhadap lingkungan hidup, serta mitigasi bencana berbasis keluarga.	Pembinaan keluarga dalam memelihara dan menjaga lingkungan bersih dan sehat	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Asta Cita 8 Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. ▪ Program Prioritas 11 Menjamin pelestarian lingkungan hidup.

NO	PROGRAM POKOK PKK	TUJUAN	SASARAN	KATEGORI PRIORITAS	KEBIJAKAN NASIONAL YANG DIDUKUNG
10	Perencanaan Sehat	Terwujudnya perencanaan kehidupan berkeluarga yang sehat dan bertanggung jawab	Meningkatnya partisipasi keluarga yang menjalankan program keluarga sehat berkualitas, memiliki perencanaan keuangan sehat, serta memperoleh edukasi kesehatan reproduksi secara tepat dan berkelanjutan.	<ul style="list-style-type: none"> a. Pembinaan Keluarga dalam meningkatkan keluarga berencana menuju Keluarga berkualitas b. Melakukan Perencanaan keuangan yang baik untuk kehidupan keluarga sehat 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Asta Cita 4 Memperkuat pembangunan SDM, sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas. ▪ Program Prioritas 7 Menjamin tersedianya pelayanan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia.

C. Operasionalisasi 10 Program Pokok PKK

Sebagai tindak lanjut dari Pemetaan 10 Program PKK pada Arah Kebijakan Nasional, bagian ini menyajikan bentuk implementasi nyata Gerakan PKK dalam lima tahun ke depan. Operasionalisasi dilakukan melalui penjabaran program dalam kegiatan strategis, yang mengacu pada visi, misi, tujuan dan sasaran Gerakan PKK Tahun 2025–2029 serta selaras dengan misi pembangunan nasional, prioritas pembangunan, dan sasaran RPJMN 2025–2029.

Tabel operasionalisasi berikut memuat rincian pelaksanaan masing-masing dari 10 Program Pokok PKK, mencakup: kategori prioritas program, indikator kinerja, serta waktu pelaksanaan. Penyusunan tabel ini dimaksudkan untuk memberikan panduan teknis dan terukur bagi seluruh jajaran pelaksana PKK di berbagai jenjang, dalam mengimplementasikan program secara sistematis, kolaboratif, dan berbasis hasil.

Tabel 3.2. Operasionalisasi 10 Program Pokok PKK

NO	PROGRAM POKOK PKK	KATEGORI PRIORITAS	KEGIATAN UTAMA	INDIKATOR KINERJA	WAKTU PELAKSANAAN
1	Penghayatan dan Pengamalan Pancasila	Pembinaan karakter keluarga	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembinaan Keluarga Indonesia Sejahtera Harmonis (KISAH) 2. Pembinaan Keluarga Sadar Hukum (KADARKUM) 3. Pembinaan Kesadaran Bela Negara (PKBN) 4. Keluarga Indonesia Sehat Tanpa Narkoba (KRISAN) 5. Pembinaan Keluarga Indonesia Lindungi Anak dari Kekerasan Seksual (KILAS) 6. Pembinaan Keluarga Indonesia Anti <i>Trafficking</i> (KIAT) 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Jumlah kegiatan yang dilaksanakan 2) Persentase keterlibatan keluarga 3) Pelibatan mitra unsur pemerintah atau non-pemerintah 4) Dokumentasi (laporan kegiatan, foto, publikasi media) 	2025-2029

NO	PROGRAM POKOK PKK	KATEGORI PRIORITAS	KEGIATAN UTAMA	INDIKATOR KINERJA	WAKTU PELAKSANAAN
2	Gotong Royong	a. Penguatan ketahanan sosial b. Pemberdayaan kelompok lanjut usia	1. Pembinaan Keluarga Indonesia Sejahtera Harmonis (KISAH) melalui Lansia Siap (LANSIAP) 2. Pembinaan Keluarga Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan (KISAK)	1) Jumlah kegiatan yang dilaksanakan 2) Persentase keterlibatan keluarga 3) Pelibatan mitra unsur pemerintah atau non-pemerintah 4) Dokumentasi (laporan kegiatan, foto, publikasi media)	2025-2029
3	Pangan	Penguatan ketahanan pangan	Ketahanan Pangan Berbasis Masyarakat – Menuju Indonesia Emas (KETAPANG-MAS): 1. Revitalisasi Aku Hatinya PKK 2. Peningkatan kapasitas keluarga dalam pemanfaatan pekarangan produktif 3. Gerakan diversifikasi pangan lokal berbasis potensi wilayah 4. Peningkatan konsumsi pangan beragam bergizi seimbang dan aman 5. Fasilitasi penyediaan makanan tambahan bagi keluarga berisiko kurang gizi 6. Pencegahan susut dan sisa pangan	1) Jumlah kegiatan yang dilaksanakan 2) Persentase keterlibatan keluarga 3) Dokumentasi (laporan kegiatan, foto, publikasi media)	2025 -2029

NO	PROGRAM POKOK PKK	KATEGORI PRIORITAS	KEGIATAN UTAMA	INDIKATOR KINERJA	WAKTU PELAKSANAAN
4	Sandang	Penguatan sandang lokal dan etika berpakaian	Gerakan Memasyarakatkan Sandang Lokal Beretika (GEMAS SANLOKA): 1. Sosialisasi dan kampanye Gema Sanloka (Gerakan Memasyarakatkan Sandang Lokal Beretika). 2. Peningkatan keterampilan keluarga dalam produksi sandang lokal (tenun, batik, sulam, dll). 3. Pemanfaatan sandang berkelanjutan (sandang tak terpakai untuk disumbang dan didaur ulang sebagai pencegahan terhadap sampah fashion).	1) Jumlah /kelompok yang terlibat 2) Volume produksi dan penjualan produk sandang lokal 3) Jumlah kegiatan untuk mendukung pemanfaatan sandang secara berkelanjutan 4) Dokumentasi kegiatan (laporan, testimoni, publikasi)	2025- 2029
5	Perumahan & Tata Laksana	Penguatan rumah sehat layak huni	Revitalisasi rumah dan tata laksana rumah tangga: bersih, sehat, rapi dan inovatif (REHARTA BERSERI): 1. Revitalisasi rumah dan tata laksana rumah tangga: bersih, sehat, rapi dan inovatif (REHARTA BERSERI). 2. Penyuluhan rumah sehat layak huni berdasarkan pedoman nasional. 3. Pelatihan keluarga tentang manajemen tata laksana rumah tangga yang efisien dengan memanfaatkan teknologi tepat guna.	1) Jumlah keluarga yang mendapat pendampingan atau bantuan 2) Persentase rumah sehat berdasarkan indikator lingkungan 3) Dokumentasi dan laporan kegiatan	2025 -2029

NO	PROGRAM POKOK PKK	KATEGORI PRIORITAS	KEGIATAN UTAMA	INDIKATOR KINERJA	WAKTU PELAKSANAAN
			4. Kemitraan dengan pemerintah dan swasta dalam program bedah rumah keluarga rentan		
6	Pendidikan dan Keterampilan	<ul style="list-style-type: none"> a. Perluasan layanan Pendidikan Anak Usia Dini b. Pencegahan dan penanganan anak tidak sekolah c. Penguatan keterampilan 	<ul style="list-style-type: none"> 1. Mendukung percepatan wajib belajar 13 tahun (1 tahun pendidikan prasekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah) melalui PAUD PKK 2. Menggerakkan keluarga dalam peningkatan ketrampilan dan pendidikan 3. Pemanfaatan teknologi digital dalam edukasi keluarga, literasi informasi, dan pelatihan keterampilan daring 4. Memfasilitasi Peningkatan kapasitas Kader PKK melalui TOT bagi tutor Kelompok Belajar Paket A,B,C (KEJAR ABC) 5. Pendidikan dan pelatihan keterampilan masyarakat berbasis potensi dan kebutuhan lokal melalui RUMAH DILAN (Rumah Pendidikan dan Keterampilan). 6. Program Rumah Cerdas Keluarga berbasis komunitas. 7. Pelatihan keterampilan berbasis gender dan inklusif (menjahit, 	<ul style="list-style-type: none"> 1) Jumlah kegiatan yang dilaksanakan 2) Persentase keterlibatan keluarga 3) Dokumentasi (laporan kegiatan, foto, publikasi media) 	2025-2029

NO	PROGRAM POKOK PKK	KATEGORI PRIORITAS	KEGIATAN UTAMA	INDIKATOR KINERJA	WAKTU PELAKSANAAN
			memasak sehat, kerajinan tangan, kewirausahaan digital) melalui kerjasama dengan instansi Balai Latihan Kerja (BLK), Dinas Pendidikan, dan sektor swasta untuk pelatihan vokasi keluarga.		
7	Kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> a. Penggerakan keluarga dalam perilaku hidup bersih dan sehat b. Pembinaan dalam penurunan angka kematian ibu, bayi dan balita c. Pembinaan keluarga sadar gizi d. Pencegahan dan deteksi dini kanker pada perempuan e. Pembinaan keluarga dalam 	<ul style="list-style-type: none"> 1. Peduli Stunting 2. Perilaku Hidup Bersih dan Sehat 3. Peduli Kesehatan Keluarga (Ayah, Ibu dan Anak) 	<p>Peduli Stunting</p> <ul style="list-style-type: none"> 1) Jumlah Bayi Lahir Prematur 2) Jumlah Bayi Lahir Berat Badan Bayi Lahir Rendah (BBLR) 3) Jumlah Balita Kurang Gizi 4) Jumlah Balita Stunting 5) Jumlah bayi dan balita yang rutin dilakukan pemeriksaan tumbuh kembang setiap bulan 6) Jumlah Ibu yang melahirkan dengan jarak terlalu dekat 7) Jumlah kehamilan yang tidak direncanakan /tidak diinginkan <p>Perilaku Hidup Bersih dan Sehat</p> <ul style="list-style-type: none"> 1) Jumlah penduduk yang mematuhi protokol Kesehatan 	2025-2029

NO	PROGRAM POKOK PKK	KATEGORI PRIORITAS	KEGIATAN UTAMA	INDIKATOR KINERJA	WAKTU PELAKSANAAN
		<p>pelaksanaan imunisasi</p> <p>f. Pencegahan penyakit menular maupun tidak menular</p>		<p>2) Jumlah rumah yang memiliki jamban sehat</p> <p>3) Jumlah rumah yang memiliki fasilitas instalasi atau bak penampung air bersih</p> <p>4) Jumlah kasus penyakit Diare</p> <p>5) Jumlah keluarga yang sadar gizi</p> <p>6) Jumlah rumah tanpa asap rokok</p> <p>7) Jumlah penduduk yang masih Buang Air Besar Sembarangan (BABS)</p> <p>Peduli Kesehatan Keluarga</p> <p>1) Jumlah Ayah yang rutin melakukan pemeriksaan kesehatan minimal 1x per tahun pada Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG) atau Medical Check Up (MCU)</p> <p>2) Jumlah ibu hamil yang rutin memeriksakan kehamilannya pada pelayanan kesehatan secara berkala</p> <p>3) Jumlah kasus Kematian Ibu nifas</p> <p>4) Jumlah kasus Kanker Serviks pada Perempuan</p>	

NO	PROGRAM POKOK PKK	KATEGORI PRIORITAS	KEGIATAN UTAMA	INDIKATOR KINERJA	WAKTU PELAKSANAAN
				5) Jumlah bayi dan balita yang mendapat imunisasi 6) Jumlah bayi dan balita sakit yang terdata pada fasilitas Kesehatan 7) Jumlah kasus Kematian Bayi dan Balita	
8	Pengembangan Kehidupan Berkoperasi	Peningkatan produktivitas usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi.	1. Menggerakkan Keluarga dalam peningkatan kualitas pengelolaan ekonomi Keluarga melalui UP2K PKK 2. Pembinaan Keluarga dalam pelaksanaan dan pengembangan kelompok UP2K PKK melalui Revitalisasi UP2K PKK; 3. Mendorong pembentukan Koperasi PKK oleh kelompok khusus UP2K PKK; 4. Pengembangan Koperasi PKK melalui peningkatan kapasitas SDM dan transformasi digital dalam manajerial pengelolaan; 5. mengembangkan kreatifitas melalui UMKM berbasis teknologi informasi. 6. Inkubasi UMKM binaan PKK	1) Jumlah kegiatan yang dilaksanakan 2) Persentase keterlibatan keluarga 3) Persentase capaian pembentukan UP2K PKK dan Koperasi PKK 4) Dokumentasi (laporan kegiatan, foto, publikasi media)	2025-2029

NO	PROGRAM POKOK PKK	KATEGORI PRIORITAS	KEGIATAN UTAMA	INDIKATOR KINERJA	WAKTU PELAKSANAAN
9	Kelestarian Lingkungan Hidup	Pembinaan keluarga dalam memelihara dan menjaga lingkungan bersih dan sehat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Siaga Kebakaran Lingkungan 2. Siaga Bencana Alam 3. Peduli Lingkungan 	<p>Siaga kebakaran lingkungan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Jumlah kasus Kebakaran Rumah Tangga 2) Jumlah rumah tangga yang memiliki instalasi listrik yang sesuai standar 3) Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Alat pemadam kebakaran 4) Jumlah Rumah Semi Permanen dan rumah kayu 5) Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Kotak P3K 6) Jumlah rumah tangga yang telah mendapatkan informasi, penyuluhan, atau sosialisasi tentang mitigasi dan penanggulangan kebakaran 7) Jumlah kader PKK yang telah mendapatkan edukasi terkait mitigasi bencana kebakaran <p>Siaga Bencana Alam</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Jumlah rumah tangga yang terdampak bencana alam 2) Jumlah rumah tangga yang telah mendapatkan informasi, penyuluhan, atau 	2025-2029

NO	PROGRAM POKOK PKK	KATEGORI PRIORITAS	KEGIATAN UTAMA	INDIKATOR KINERJA	WAKTU PELAKSANAAN
				<p>sosialisasi tentang mitigasi dan penanggulangan bencana alam</p> <p>3) Jumlah kader PKK yang telah mendapatkan edukasi terkait mitigasi bencana alam</p> <p>4) Jumlah fasilitas / bangunan yang ditetapkan sebagai alternatif posko bila terjadi bencana alam</p> <p>5) Jumlah relawan bencana alam</p> <p>6) Jumlah rumah tangga yang memiliki tas siaga bencana</p> <p>7) Jumlah kerusakan fasilitas umum yang diakibatkan oleh bencana alam</p> <p>Peduli Lingkungan</p> <p>1) Jumlah Rumah yang memiliki bak sampah</p> <p>2) Jumlah Anggota Bank Sampah</p> <p>3) Jumlah rumah yang menggunakan Sistem Pembuangan Air Limbah (SPAL)</p> <p>4) Jumlah kasus banjir</p>	

NO	PROGRAM POKOK PKK	KATEGORI PRIORITAS	KEGIATAN UTAMA	INDIKATOR KINERJA	WAKTU PELAKSANAAN
				5) Jumlah bak sampah milik Desa/Kelurahan 6) Jumlah Rumah dengan ventilasi udara yang baik 7) Jumlah kasus Kejadian Luar Biasa (KLB)	
10	Perencanaan Sehat	a. Pembinaan Keluarga dalam meningkatkan keluarga berencana menuju Keluarga berkualitas b. Melakukan Perencanaan	1. Menuju Keluarga Sehat Berkualitas 2. Menuju Keuangan Sehat 3. Mewujudkan Keluarga Sehat Pasangan Usia Subur	Menuju keluarga sehat berkualitas 1) Jumlah Keluarga dengan 2 anak 2) Jumlah Penduduk yang berobat ke fasilitas Kesehatan 3) Jumlah kasus penyakit menular 4) Jumlah kasus penyakit tidak menular	2025-2029

NO	PROGRAM POKOK PKK	KATEGORI PRIORITAS	KEGIATAN UTAMA	INDIKATOR KINERJA	WAKTU PELAKSANAAN
		keuangan yang baik untuk kehidupan keluarga sehat		5) Jumlah Bayi Lahir Sehat 6) Jumlah Bayi Lahir Cukup Bulan 7) Jumlah keluarga yang memiliki anggota dengan kriteria penyakit gangguan jiwa Menuju Keuangan sehat 1) Jumlah Keluarga yang memiliki Asuransi Kesehatan 2) Jumlah kepala keluarga yang tidak memiliki pekerjaan / Pengangguran 3) Jumlah kepala keluarga yang tidak memiliki pekerjaan tetap 4) Jumlah Kepala Keluarga yang memiliki penghasilan tetap 5) Jumlah Ibu hamil yang mempunyai Tabungan bersalin (TABULIN) 6) Jumlah keluarga yang memiliki Tabungan 7) Jumlah keluarga yang mempunyai aset untuk investasi	

NO	PROGRAM POKOK PKK	KATEGORI PRIORITAS	KEGIATAN UTAMA	INDIKATOR KINERJA	WAKTU PELAKSANAAN
				<p>Mewujudkan keluarga sehat pasangan usia subur</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Jumlah Ibu melahirkan Bayi sehat 2) Jumlah Wanita sebagai peserta KB 3) Jumlah Pria peserta KB 4) Jumlah Wanita pada Pasangan Usia Subur (PUS) yang memiliki masalah kesehatan reproduksi 5) Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) yang menikah dengan isteri usia di bawah 20 Tahun 6) Jumlah Wanita Usia Subur dengan kehamilan berisiko 7) Jumlah penderita penyakit infeksi menular seksual pada Pasangan Usia Subur (PUS) 	



BAB IV

PENUTUP



BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Rencana Induk Gerakan PKK Tahun 2025–2029 merupakan dokumen strategis yang dirancang untuk memperkuat posisi serta tugas dan fungsi Gerakan PKK sebagai mitra pemerintah dalam pembangunan keluarga dan masyarakat dalam upaya mendukung Asta Cita. Dokumen ini menjadi pedoman utama bagi seluruh jajaran Tim Penggerak PKK dalam menggerakkan, mengelola, dan mengevaluasi pelaksanaan 10 Program Pokok PKK secara terencana, sistematis, dan terukur.

Rencana Induk ini menjadi wujud komitmen Gerakan PKK untuk terus hadir sebagai kekuatan sosial yang relevan, adaptif, dan berdampak langsung bagi keluarga Indonesia dalam menghadapi tantangan global dan transformasi sosial yang dinamis.

B. Rekomendasi

Agar implementasi Rencana Induk ini berjalan optimal dan berkelanjutan, maka disampaikan sejumlah rekomendasi strategis sebagai berikut:

1. Integrasi dan Harmonisasi Program

Pemerintah pusat dan daerah bersama TP PKK perlu menyusun Strategi Gerakan PKK di setiap jenjangnya pada setiap tahun, guna mengintegrasikan program-program PKK ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah, guna menjamin kesinambungan dan dukungan anggaran secara sistemik.

2. Penguatan Kelembagaan dan Kaderisasi

Perlu dilakukan penguatan Tim Penggerak PKK di semua jenjang, termasuk peningkatan kapasitas kader melalui pelatihan berbasis kompetensi, sistem insentif, serta regenerasi yang berkesinambungan.

3. Pemanfaatan Teknologi Informasi

Percepatan digitalisasi dalam pengelolaan data keluarga, pelaporan kegiatan, serta publikasi hasil program PKK harus menjadi prioritas, untuk mendukung efisiensi, akuntabilitas, dan perluasan dampak.

4. Kemitraan Multi Pihak yang Berkelanjutan

Diperlukan penguatan kemitraan antara TP PKK dengan OPD teknis, sektor swasta, akademisi, organisasi masyarakat, dan

media dalam mendukung pelaksanaan program-program unggulan secara sinergis dan lintas sektor.

5. Sistem Monitoring dan Evaluasi yang Akurat dan Responsif
Setiap pelaksanaan program harus dilengkapi dengan indikator kinerja, alat ukur dampak, serta mekanisme umpan balik yang memungkinkan perbaikan berkelanjutan dan berbasis bukti.
6. Revitalisasi Praktik Baik dan Inovasi Lokal
Pengumpulan, dokumentasi, dan replikasi praktik baik dari daerah dapat menjadi sumber inspirasi dan inovasi untuk pengembangan program yang relevan dengan konteks lokal.
7. Pendekatan Inklusif dan Responsif Gender
Seluruh strategi dan program hendaknya dijalankan dengan pendekatan yang menjamin partisipasi kelompok rentan (perempuan, anak, lansia, penyandang disabilitas) secara setara dan bermartabat.

Dengan rekomendasi tersebut, diharapkan pelaksanaan Rencana Induk Gerakan PKK Tahun 2025–2029 tidak hanya menjadi dokumen kebijakan semata, melainkan menjadi panduan nyata yang mendorong perubahan sosial yang transformatif dari tingkat keluarga hingga masyarakat secara luas.